

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE TINGKAT SMP DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG**

Oleh : Hijriatul Aini dan I Nyoman Mudarya

## **Abstraksi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP yang belakangan ini sudah dilaksanakan secara online demi memudahkan calon peserta didik supaya tidak perlu lagi datang ke sekolah yang akan dituju.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ? ; 2) apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ?

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Faktor pendukung internal pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan tersebut yang memiliki kehandalan, kompetensi dan pengalaman serta adanya dukungan dana yang dikucurkan melalui APBD. Faktor pendukung eksternalnya adalah adanya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, SK Bupati Buleleng, dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Juga kondisi geografis dimana sebagian wilayah di Buleleng sudah terjangkau jaringan internet serta sebagian besar masyarakat sudah memiliki HP android. Sedangkan faktor penghambat internalnya adalah keterbatasan teknologi yakni kemampuan server aplikasi dalam menerima dan menginput data. Faktor penghambat eksternalnya adalah adanya ketidaktaatan orang tua calon peserta didik dalam mematuhi segala aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan..

Kata kunci : implementasi kebijakan, PPDB online

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sekarang ini, baik disadari maupun tidak disadari telah membuat perubahan pola pikir, budaya, serta cara pandang dan juga tingkah laku masyarakat. Perkembangan yang dimaksud antara lain munculnya sebuah teknologi yaitu komputer. Keberadaan komputer telah banyak mempengaruhi sektor kehidupan manusia terutama pada sektor pendidikan. Perkembangan teknologi disisi lain juga menuntut dunia pendidikan agar dapat memanfaatkan teknologi untuk

memberikan pelayanan pendidikan yang ada di Indonesia agar tidak tertinggal dengan Negara lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam setiap periode selalu melakukan perkembangan yang begitu pesat. Sejalan dengan perkembangan teknologi membuat masyarakat sangat beruntung dan membutuhkan informasi yang begitu cepat, akurat, ini karena informasi adalah bagian yang begitu penting agar dapat menjalin sebuah komunikasi yang baik. Teknologi informasi semakin mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun, karena adanya media informasi serta komunikasi yang begitu canggih. Perkembangan teknologi dapat mendorong begitu banyak aspek agar lebih mengefisienkan sebuah pekerjaan sehingga dapat diakses menggunakan website dengan mudah.

Pendidikan adalah sebuah pondasi dari proses pembangunan atau pembentukan kualitas sumber daya manusia. Terciptanya sumber daya manusia berkualitas perlu adanya layanan pendidikan yang baik pula. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting untuk menciptakan sebuah layanan pendidikan yang berkualitas agar terciptanya sumber daya manusia yang baik. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang bertugas agar menerapkan layanan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 11 ayat 1, menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sebuah layanan serta kemudahan, dan juga menjamin agar terselenggaranya pendidikan yang berkualitas untuk setiap masyarakat tanpa adanya diskriminasi, layanan pendidikan yang sangat mengutamakan kepuasan peserta didik.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat memudahkan beberapa kegiatan manusia untuk dilakukan secara *online*. Sejalan dengan hal ini penerimaan peserta didik baru sekarang ini menggunakan sistem online. Banyak sekolah-sekolah telah menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online*, salah satunya yaitu di kabupaten Buleleng. Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah diselenggarakan secara *online*. PPDB dengan sistem online adalah salah satu cara penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng serta terhubung dengan

seluruh sekolah SMP yang berada di daerah tersebut. Pelaksanaan PPDB *online* ini dilakukan berdasarkan pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK. Berdasarkan Peraturan tersebut, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem *online* dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru secara cepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan peserta didik baru proses pelaksanaannya berlandaskan pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021:

1. Objektif, berarti dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru semua harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku;
2. Transparan, artinya dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus bersifat terbuka serta dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat khususnya orang tua/wali dari calon peserta didik yang bersangkutan;
3. Akuntabel, dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat mulai dari prosedur maupun hasilnya;
4. Kompetitif atau Berkeadilan, artinya proses penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan melalui seleksi dengan berdasarkan pada Nilai Ujian Nasional atau dengan penambahan nilai prestasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *online* di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan pendidikan yang bermutu. PPDB dengan sistem *online* dilakukan dapat menggantikan PPDB dengan sistem manual yang rentan terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan petunjuk teknis PPDB Daya tampung calon peserta didik baru yang melakukan PPDB dengan sistem *online* ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Daya tampung untuk calon peserta didik baru berdasarkan jalur zonasi sebanyak 50% dengan ketentuan diperuntukan kepada peserta didik yang memiliki domisili dalam wilayah zonasi, sekolah mengutamakan peserta didik yang kartu

keluarganya berdomisili pada satu wilayah Kabupaten atau Kota yang sama berdasarkan sekolah asal. Daya tampung untuk calon peserta didik berdasarkan jalur Afirmasi paling sedikit 15% dalam hal ini calon peserta didik baru yang masuk dengan jalur Afirmasi adalah peserta didik yang bertempat tinggal di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang berkaitan. (Permendikbud No 1 Tahun 2021)

Daya tampung calon peserta didik baru berdasarkan jalur perpindahan tugas orang tua wali ditentukan paling sedikit 5% dalam hal ini perpindahan orang tua wali harus dibuktikan berdasarkan surat penugasan dari instansi terkait, jalur ini juga dapat digunakan pada anak guru. Sedangkan untuk daya tampung jalur prestasi ditentukan berdasarkan sisa kuota dari ketiga jalur yang telah dijelaskan, jalur prestasi ditentukan berdasarkan akumulasi dari nilai raport semester 1 sampai semester 5.

Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *online* dapat memudahkan calon pendaftar atau calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran. Calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran di mana saja dan kapan saja dengan terus memperhatikan jadwal pendaftaran. Calon peserta didik baru tidak perlu lagi datang ke sekolah dengan mengisi formulir pendaftaran, sebab calon peserta didik baru dapat melakukan pengisian formulir pendaftaran secara *online* kapan saja. Melihat pentingnya serta manfaat dari adanya sistem PPDB online ini, sehingga dalam penerapannya harus dilaksanakan dengan baik berdasarkan pada peraturan PPDB dengan sistem *online*. Oleh karena itu, program PPDB online harus didukung juga dengan perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang bermutu baik, sarana dan prasarana yang memadai, sosialisasi kepada orangtua/wali siswa agar pada saat proses pelaksanaannya tidak terdapat kendala atau masalah yang bisa menghambat program tersebut.

Sistem PPDB *online* sudah diterapkan beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Buleleng, namun terdapat sedikit kekurangan yaitu permasalahan informasi kepada orangtua/wali siswa terkait dengan pemetaan zona di masing-masing satuan pendidikan. Akibatnya banyak siswa yang salah jalur dalam proses melamar sekolah. (Balipuspanews, 2023)

Disamping itu ada beberapa masalah yang lain lagi juga terjadi, diantaranya pada saat proses PPDB *online* sedang berlangsung, jaringan internet dengan tiba-tiba melambat. Masalah tersebut berlangsung beberapa menit, akan tetapi dapat mengganggu kelancaran jalannya proses PPDB *online*. Melihat bahwa penggunaan teknologi juga menggunakan jaringan listrik dalam mengoperasikannya, sehingga pada saat PPDB berlangsung terkadang listrik sekolah padam. Keluhan yang lain adalah calon peserta didik baru atau orang tua wali kurang paham mengenai tahap verifikasi, kurang maksimalnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait menjadi penyebab kurang pahamnya mereka mengenai PPDB dengan sistem *online*.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Online Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ?
2. Faktor-Faktor Apa Sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ?

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Arikunto (2011 : 12) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi hanya menggunakan kata-kata. Sedangkan menurut Bungin (2012 : 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Koor Perencana, Operator Dinas dan Sekolah, dan perwakilan orang tua dan siswa. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah. Dalam artian, informan yang ditunjuk memiliki tujuan untuk dapat memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini jumlah

informan tidak dibatasi, melainkan disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan PPDB online Tingkat SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, yang meliputi : a) Komunikasi; b) Sumber daya; c) Disposisi; dan d) Struktur Birokrasi.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan PPDB online Tingkat SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, yang meliputi : faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi PPDB online Tingkat SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data mengikut apa yang disampaikan Milles dan Huberman (Sugiyono,2014) yakni dengan empat tahapan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan PPDB online Tingkat SMP di Disdikpora Kabupaten Buleleng**

Saat berakhirnya satu tahun ajaran dan menjelang memasuki tahun ajaran baru, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disibukkan dengan kegiatan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) untuk semua satuan pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang memiliki tupoksi dalam pengelolaan pendidikan dasar, maka untuk tahun ajaran 2024/2025 mengurus PPDB untuk satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/ /HK/2024 Tentang Tim

Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025, yang susunan keanggotaannya terdiri atas lintas instansi, yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan ditentukan oleh beberapa faktor atau variabel, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Variabel-variabel tersebut adalah : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan atau implementor mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Pelaksana kebijakan harus menyampaikan kepada kelompok sasaran apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. Juga diperlukan adanya hubungan komunikasi antara pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, pelaksana program dalam hal ini Tim Koordinasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng tersebut harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Beberapa instansi yang terlibat di dalamnya juga harus selalu saling berkomunikasi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yakni Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga, serta Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, dapat diketahui bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mensosialisasikan segala hal terkait PPDB online SMP. Instansi-instansi yang telah ditunjuk untuk terlibat dalam pelaksanaan PPDB online SMP tersebut juga harus selalu berkoordinasi dan

berkomunikasi demi kelancaran pelaksanaan PPDB online SMP tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III ( Subarsono, 2014 ) bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi yang artinya, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran ( *target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Juga sesuai dengan Model Implementasi Kebijakan Publik yang disampaikan oleh Van Metter dan Van Horn ( dalam Agustino, 2016 ), bahwa yang dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan publik, salah satunya adalah komunikasi yang merupakan salah satu cara dalam implementasi kebijakan publik. Apabila hubungan komunikasi antara pihak yang terlibat didalam proses implementasi berjalan dengan baik, maka kesalahan-kesalahan yang terjadi akan minim untuk terjadi, begitu juga sebaliknya.

## **2.Sumberdaya**

Implementasi sebuah kebijakan sangat memerlukan adanya sumberdaya yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehebat apapun perencanaan yang dilakukan, semulia apapun tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut, tanpa dukungan sumberdaya yang memadai, kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sumberdaya yang dimaksudkan disini adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial serta sumber daya waktu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan melalui proses wawancara serta didukung hasil observasi dan memanfaatkan berbagai dokumen yang ada di lokasi penelitian, dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan PPDB online SMP Tahun Ajaran 2024/2025 di Kabupaten Buleleng sangat didukung oleh adanya pelaksana kebijakan yakni Tim Koordinasi PPDB bentukan Bupati Buleleng yang terdiri dari beberapa instansi terkait, koordinator dan anggota Tim yang sesuai kompetensinya, tenaga administrasi yang handal di bidangnya, dana yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui APBD Tahun Anggaran 2024, serta alokasi waktu yang cukup memadai Hal ini



sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III ( Subarsono, 2014 ), bahwa sumberdaya merupakan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn ( Subarsono, 2014 : 100) bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resource*)

### **3. Disposisi**

Pelaksana kebijakan apalagi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, haruslah dipilih orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu sesama, memiliki kejujuran, serta berlaku adil dan bersifat demokratis. Begitu pula dengan pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, memerlukan pelaksana kebijakan dalam hal ini seluruh Koordinator dan anggota Tim Koordinasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 adalah orang-orang yang memiliki komitmen, kejujuran dan tipikal pekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan PPDB tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan , dapat diketahui bahwa terkait implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di kabupaten Buleleng, semua anggota Tim Koordinasi PPDB yang terlibat haruslah orang-orang yang jujur, memiliki komitmen untuk membantu sesama, bersikap adil dan demokratis serta mau menerima masukan dan saran demi perbaikan pelaksanaan program tersebut kedepannya. Seperti yang disampaikan oleh Edwards III ( Subarsono, 2014) tentang disposisi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan, yang menyangkut dua hal yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pelaksanaan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, maka mekanisme pelaksanaannya dari proses perencanaan, pendataan calon peserta didik , pendaftaran peserta didik, proses seleksi sampai proses penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik di sekolah tertentu tidaklah terlalu rumit.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan tersebut, didukung hasil observasi di lokasi penelitian serta melihat dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa pelaksana PPDB lewat Tim Koordinasi PPDB Tahun 2024/2025 khususnya PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng berusaha untuk mempermudah segala proses pelaksanaannya dari proses pendataan, pendaftaran sampai pada proses diterimanya seorang anak di sekolah tertentu dengan tidak menerapkan prosedur dan struktur birokrasi yang panjang dan rumit, karena semua itu akan mempersulit masyarakat, orang tua dan calon peserta didik. Meskipun memang yang namanya struktur birokrasi dengan SOP tersebut memang harus dijalankan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III ( Subarsono, 2014 ) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang dengan SOP yang rumit dan terkesan kaku justru akan melemahkan proses pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### **5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PPDB online Tingkat SMP**

Pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan atau program, apalagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka akan selalu ada faktor pendukung dan penghambat kebijakan tersebut. Faktor pendukung bisa berupa pendukung

internal dan pendukung eksternal. Faktor penghambat juga berupa penghambat internal dan penghambat eksternal.

### **5.1 Faktor Pendukung**

Faktor pendukung sebuah kebijakan atau program berperan dalam memperlancar pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, maka ada faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal.

#### **1. Faktor Pendukung Internal**

Yang menjadi faktor pendukung internal pelaksanaan PPDB online tingkat MP di Kabupaten Buleleng adalah sumberdaya baik itu sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia yang dimiliki. Sumberdaya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB online tingkat SMP yakni Tim Koordinasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025. Sedangkan sumberdaya non manusianya adalah sarana dan prasarana serta anggaran yang dikelola oleh Tim Koordinasi PPDB tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yakni Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, dan anggota Tim Pengawasan PPDB online yang juga seorang Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, didukung dengan pengamatan atau observasi langsung di lokasi penelitian, serta memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa keberadaan sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia sangat mendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn (Subarsono, 2014 : 100), bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resource*). Juga sesuai dengan pendapat George C. Edwards III (Subarsono, 2014 : 91), bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

## 2. Faktor Pendukung Eksternal

Yang menjadi faktor pendukung eksternal pelaksanaan PPDB onlin tingkat SMP di Kabupaten Buleleng adalah adanya beberapa regulasi pendukung seperti: (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; (2) Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/ /HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025; dan (3) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 400.3.1/7958/Skrt/IV/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan lewat hasil wawancara , didukung dengan melihat berbagai dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa adanya regulasi tentang PPDB berupa Permendikbud, Surat Keputusan Bupati dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sangat mendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Anderson (Islamy,2012 : 108-111), bahwa dalam implementasi kebijakan, perlu juga diketahui tentang sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh negara. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :1)respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah; 2)adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;3)adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar;4)adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.

Faktor eksternal lainnya yang menjadi pendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng adalah faktor geografis Kabupaten Buleleng dimana tidak ada daerah di Wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak terjangkau oleh fasilitas jaringan internet dan sebagian besar masyarakat sudah memiliki HP android. Hal ini berdampak pada tidak sulitnya masyarakat untuk mengakses

internet untuk masuk ke aplikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk PPDB online tingkat SMP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didukung hasil observasi dan melihat data yang ada di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng yang sebagian besar sudah terjangkau oleh jaringan internet, ditambah lagi sebagian besar masyarakat bahkan anak-anak SD sudah memiliki HP android menjadi faktor pendukung eksternal yang memudahkan dalam pelaksanaan PPDB online SMP. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (Subarsono, 2014 : 98), bahwa ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satunya adalah variabel lingkungan kebijakan yakni adanya dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

## **5.2 Faktor Penghambat**

Selain adanya faktor pendukung implementasi sebuah kebijakan, tentunya akan ada yang menjadi faktor penghambatnya. Terkait implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, maka faktor penghambatnya adalah faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

### **1. Faktor Penghambat Internal**

Yang menjadi faktor penghambat internal pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng adalah kemampuan server aplikasi menerima data yang dimasukkan oleh para calon peserta didik tingkat SMP yang untuk tahun ajaran 2024/2025 mencapai 12.661 orang dengan waktu pendaftaran yang hanya 10 hari saja.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para orang informan lewat hasil wawancara, didukung pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa keterbatasan kemampuan server aplikasi dalam menerima dan menginput data serta alokasi waktu yang terbatas merupakan faktor penghambat internal pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan Model Implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2016), bahwa yang dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan publik salah satunya adalah Sumber daya, dimana selain sumber daya manusia ada sumber daya waktu. Ketika

sumber daya manusia kompeten dalam bekerja dan dan yang dibutuhkan memadai, akan tetapi bermasalah dengan waktu yang ketat, sehingga hal ini pula dapat menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan.

## **2. Faktor Penghambat Eksternal**

Faktor eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng adalah perilaku dari calon peserta didik atau orang tuanya yang tidak mentaati aturan serta persyaratan dalam mendaftar secara online dan mengabaikan alokasi waktu yang telah ditetapkan sesuai jalur yang dipilih. Masih adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik, seperti kasus "numpang KK" yang tentunya menyulitkan tim seleksi karena harus mengecek dan mengkonfirmasi lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didukung dengan observasi di lokasi penelitian serta melihat berbagai dokumen khususnya dokumen tentang berbagai permasalahan yang muncul pada PPDB online tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa yang menjadi kendala eksternal pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng adalah adanya ketidaktaatan masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik mematuhi segala aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan. Supaya tidak terjadi hambatan dan masalah maka masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik harus taat dan patuh pada aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Anderson (Islamy, 2012 : 108-111), bahwa dalam implementasi kebijakan, perlu juga diketahui tentang sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh negara. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :1) respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar; 4) adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menyangkut pemahaman implementor terhadap apa yang dilakukan. Dalam hal ini bagaimana para pelaksana kebijakan khususnya tentang PPDB online memahami betul sistem PPDB online tersebut. Juga dengan komunikasi antar instansi yang terlibat dalam PPDB online Sumberdaya menyangkut sumberdaya manusia yakni yang menangani secara langsung PPDB online dan sumberdaya non manusia, berupa ketersediaan dana dan alokasi waktu yang mencukupi. Disposisi berkaitan dengan watak dan karakter pelaksana kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi menyangkut mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, meliputi faktor pendukung internal dan eksternal, serta faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor pendukung internal adalah adanya sumberdaya yang mendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng. Faktor pendukung eksternalnya adalah berbagai regulasi yang bisa dijadikan pedoman untuk mempermudah dalam pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, seperti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Koordinasi PPDB Tahun Ajaran 2024.2025, dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Faktor pendukung eksternal yang lain adalah secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng sudah terjangkau jaringan internet serta sebagian besar masyarakat sudah memiliki HP android. Faktor penghambat internalnya adalah kemampuan server aplikasi dalam menerima data yang masih terbatas. Sedangkan faktor penghambat eksternalnya adalah ketidaktaatan orang tua calon peserta didik mematuhi semua aturan dan persyaratan termasuk mengabaikan alokasi waktu dalam pendaftaran secara online.

Selanjutnya berkaitan dengan implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, dapat disarankan beberapa hal :

1. Senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim panitia PPDB termasuk terhadap perangkat yang digunakan supaya kedepannya permasalahan-permasalahan yang ditemui bisa lebih diminimalisir sehingga proses PPDB online dapat berjalan lancar. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak sama antara yang tinggal dipertanian dengan yang tinggal di pedesaan.
2. Berbagai faktor pendukung pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan faktor penghambatnya secepatnya bisa dicarikan solusi supaya kedepannya tidak lagi menjadi hambatan bagi pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Buleleng. Apabila permasalahan daya tampung server masih menjadi kendala maka kedepannya harus ditingkatkan. Begitu juga dengan proses sosialisasi yang harus dilaksanakan secara intensif supaya masyarakat benar-benar paham dengan kebijakan yang dilaksanakan dalam PPDB online tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta

Arikunto, Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Raja Grafindo : Jakarta

Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, 2023, *Profil dan Informasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*.

Islamy, Irfan, 2012, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta

Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan*.



Subarsono, AG. 2014. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. *Metode Peneleitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 400.3.1/7958/Skrt/IV/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/ /HK/2024 Tentang Tim Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.